

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Reformasi di institusi pemerintah mulai dibangun dengan dikeluarkannya beberapa landasan hukum seperti peraturan-peraturan mengenai daerah otonom, pengenalan perangkat teknologi untuk mempercepat proses organisasi, dan penerapan sistem organisasi dengan berbasis *good Governance* kepada institusi pemerintah. Salah satu pilar utama sistem *good Governance* adalah akuntabilitas. Untuk mewujudkan *Good Governance* diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya. Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan instansi pemerintah daerah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, salah satunya untuk membuat akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat mengenai aktivitas keuangan di institusi pemerintahan (Dewi, 2017).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai dan pihak kepentingan, maka laporan keuangan harus disusun oleh personil yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan daerah dan sistem akuntansi agar terhindar dari salah pencatatan atau kecurangan akuntansi yang biasa disebut *fraud*. Praktek untuk melakukan kecurangan (*fraud*) tidak hanya terjadi di sektor swasta (perusahaan) saja, justru di lingkungan sektor publik (pemerintahan) lebih rentan terjadi praktek *fraud*.

Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah diperbarui oleh PP No. 71 Tahun 2010. Dalam lingkup pemerintahan, pembuat laporan diuntut untuk menaati aturan akuntansi dikarenakan hasil laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan terutama masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas agar terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governnance*). Ketidaktaatan pembuat laporan keuangan terhadap aturan akuntansi yang berlaku, mengidentifikasikan bahwa pembuat laporan mencari celah untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Kota Palembang masuk kategori yang bagus, karena telah meraih 4 kali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Meskipun pemerintah kota Palembang memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan berbagai permasalahan seperti

pengelolaan kas, pengelolaan piutang, pengelolaan aset tetap, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja pegawai. Saldo awal kas dana BOS tahun ajaran 2017, tidak sesuai sisa dana BOS TA 2016. ditemukan juga bahwa aset tetap yang dicatat secara gabungan dan tidak ditemukan keberadaannya dan dikuasai pihak lain (Efen Permata, 2018).

Selain itu masih banyak penyimpangan- penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah, yaitu bahwa Kinerja Kejaksaan Negeri Muara (Kejari) Enim patut di apresiasi, pasalnya baru beberapa minggu menahan terangka kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) untuk E-learning dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pusat di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim, Kejaksaan Negeri Muara Enim kembali menetapkan satu orang tersangka di instansi Badan Penanggulangan Badan Bencana Daerah (BPBD) atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang menggunakan dana APBD tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.403.545.000,-. Selain itu kasus kecurangan korupsi juga terjadi di wilayah Riau yang dikutip dari RIAUPO.CO menyatakan bahwa Jaka Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Teluk Kuantan menuntut terdakwa korupsi alat kesehatan (Alkes) di RSUD Kuansing Barana dengan hukuman 18 bulan penjara, dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Ia dinilai bersalah merugikan negara dengan jumlah Rp 992 juta serta merekayasa pengadaan Alkes. Proyek pengadaan peralatan medis instansi mata dan penunjang medis instalasi mata dan penunjang medis *water*

*trearment* di RSUD Teluk Kuantan Kuaing pada tahun 2008 ini diusulkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kuansing tahun 2008 dan disetujui sebesar Rp 3.152.677.000, di mana pengusulan tersebut tidak ada usulan dari bidang terkait, semua atas perintah dari direktur RSUD dr Djamudin Djalan Mkes untuk memasukkan kegiatan tanpa dilengkapi dokumen perencanaan dan item pengadaan (Junia, 2017).

Hasil penelitian Sheifer dan Vishny (1993) serta Gaviria (2001) dalam Amalia (2015) menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh tingkat korupsi suatu negara.

Korupsi merupakan kasus kecurangan yang sering terjadi di Lembaga atau instansi pemerintah. Kasus korupsi tersebut menjadi perhatian penting dan isu utama karena mempengaruhi perekonomian dan stabilitas negara. Kasus korupsi merupakan salah satu bentuk kecurangan yang menimbulkan kerugian negara dan memberikan keuntungan bagi pelaku korupsi (Tehupuring dan Lingga, 2017).

Banyak sekali para ahli yang mencoba merumuskan pengertian korupsi, dan jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada intinya memiliki makna yang sama. Dalam pendekatan sosiologis korupsi adalah “penyalahgunaan wewenang pejabat untuk kepentingan pribadi” (*“the abuse of public power for private gain”*) (Tuanakotta, 2014).

Menurut Black Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain yang secara salah menggunakan jabatannya atau kekuasaannya

untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak orang lain (Zulkarnain, 2013).

Mencegah tindakan kecurangan (*fraud*), organisasi harus memiliki pengendalian internal yang kuat. Pengendalian internal diartikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya organisasi. Selain itu, berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*) (Sukadwilinda dan Ratnasari, 2013).

Tidak hanya pengendalian internal yang efektif yang dapat meminimalisir adanya tindakan kecurangan, akan tetapi juga integritas. Integritas dianggap sebagai suatu prinsip untuk mematuhi peraturan yang ada dalam melakukan setiap kegiatan. Integritas merupakan komitmen teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian konsep diri yang ditampilkan melalui perilaku. Dengan integritas seseorang diharuskan bersikap jujur, berani, bertanggungjawab, bijaksana dan transparan (Dewi dan Ratnadi, 2017).

Faktor lain yang dapat mencegah perbuatan kecurangan adalah kesesuaian kompensasi. Kesesuaian kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan instansi kepada karyawan berupa upah perjam atau gaji. Jika kompensasi yang diberikan dirasa tidak cukup maka karyawan atau pegawai akan melakukan tindakan kecurangan untuk memenuhi kompensasi. Dengan kompensasi yang sesuai maka dapat mengurangi adanya kecurangan akuntansi (*fraud*) (Amalia, 2015).

Selanjutnya faktor yang dapat mencegah tindakan kecurangan adalah moralitas aparat. Moralitas merupakan sifat moral dan nilai yang berkenaan baik dan buruk. Moral sendiri dapat diartikan baik atau buruknya sikap atau perilaku seseorang. Dengan begitu seorang aparat yang memiliki penalaran moral yang tinggi lebih cenderung menghindari perbuatan yang mengarah pada kecurangan akuntansi (*fraud*) (Amalia, 2015).

Selain itu kecurangan akuntansi dalam pemerintah dapat terjadi karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenali informasi internal dan prospek di masa yang akan datang dibandingkan prinsipal dan pemegang saham lainnya (Lestari dan Supadmi, 2017).

Menurut penelitian *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dalam Amalia (2015), “bahwa pada semester II periode 1 Juli sampai 31 Desember 2010 menyatakan bahwa jumlah kasus korupsi mengalami peningkatan yaitu mencapai 272 kasus. Pada semester pertama tahun 2010, BPS mencatat bahwa korupsi pada sektor keuangan daerah berada di peringkat paling atas yaitu 38%. Secara factual, Indonesia termasuk negara dengan tingkat korupsi yang tinggi di dunia, yaitu peringkat 100 dari 183 terkorup dengan indeks korupsi 3,0 (*Transparency international, 2011*).” Dan dalam penelitian Novikasari (2017), “bahwa secara factual Indonesia masih termasuk negara dengan peringkat korupsi yang tinggi di dunia, yaitu dengan posisi 107 dari 174 negara terkorup dengan indeks korupsi 3,4 (*Transparency international, 2014*).”

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Supadmi (2017) dengan menambahkan variabel moralitas aparat dan kesesuaian kompensasi. Penelitian ini dilakukan untuk menggali persepsi para pegawai pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang.

Kasus-kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada organisasi perangkat daerah kota Palembang, yaitu penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh mantan sekretaris daerah, Harobin Mustofa karena ditemukannya banyak kendaraan dinas yang belum dikembalikannya dan Ananda Rani selaku kabag keuangan dan sekaligus menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) atas proyek pengadaan lift di kantor BPKAD. Beliau melaporkan bahwa lift yang dipasang di kantor BPKAD produk Jerman namun ternyata lift yang dipasang produk Cina dengan kerugian negara sebesar 310 juta dan Marzuki sebagai pelaksana dari PT Japri Sentosa (Poetra, 2019)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Aparat, dan Asimetri Informasi terhadap Kecurangan Akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada OPD di kota Palembang?

2. Apakah integritas berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada OPD di kota Palembang?
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada OPD di kota Palembang?
4. Apakah moralitas aparat berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada OPD di kota Palembang?
5. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada OPD di kota Palembang?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memfokuskan hasil penelitian ini, maka penelitian ini akan berada dalam batas pembahasan mengenai pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah kota Palembang, tahun 2020.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi pada OPD kota Palembang
2. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kecurangan akuntansi pada OPD kota Palembang
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas aparat terhadap kecurangan akuntansi pada OPD kota Palen<sup>9</sup>
4. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi pada OPD kota Palembang



5. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi pada OPD kota Palembang

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran kepada instansi pemerintah kota Palembang apakah pengendalian internal, integritas, moralitas aparat, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi berpengaruh pada kecurangan akuntansi.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk menambah wawasan dan dapat menjadi bahan referensi maupun acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, yang berkaitan dengan pengaruh pengendalian internal, integritas, moralitas aparat, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi pada kecurangan akuntansi

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

10

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian dan manfaat penelitian, serta uraian mengenai sistematika penulisan berupa uraian-uraian singkat mengenai bab-bab dalam skripsi.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan berbagai teori yang relevan terhadap penelitian serta pendapat-pendapat para ahli dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dimulai dengan uraian tentang metode penelitian digunakan. Selanjutnya menjelaskan tentang operasional variabel yang didalamnya menjelaskan mengenai variabel dan pengukuran serta dijelaskan juga sifat, jenis dan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel atau objek penelitian yang digunakan dan di akhiri dengan metode pengumpulan data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi uraian tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan terdiri atas analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian sebelumnya serta keterbatasan penelitian dan saran – saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.